



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA PARIAMAN**

Jln Siti Manggopoh No. Tlp/Fax (0751) 690960 Manggung - Pariaman

Pariaman, 15 Juni 2024

Nomor : 428/SET.DPRD/2024.  
Lampiran :  
Perihal :  
Hal : Dokumen GAP dan GAB

Kepada : Sdr. Kepala Bappeda Kota Pariaman

Di-  
PARIAMAN

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti rapat Pengarus utamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif pada tanggal 07 Mei 2024 di ruangan rapat Walikota maka bersama ini kami kirimkan Dokumen Gender Analysis Patway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) Sekretariat DPRD Kota Pariaman sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN,



**INDRA SAKTI, SH, MM**  
NIP. 196601011989031017

## KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE

### "GENDER ACTION BUDGET (GAB)

#### SUB KEGIATAN TA 2025

Perangkat Daerah	: Sekretariat DPRD Kota Pariaman
Program	: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
Kegiatan	: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Reses
Kode Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03
Kinerja	: Terlaksananya Pelaksanaan Reses
Indikator	: Jumlah Pelaksanaan Reses
Satuan	: dokumen

#### A. Latar Belakang

##### 1. Dasar Hukum

- a. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- b. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
- h. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026

##### 2. Gambaran Umum

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat pada tingkat Kabupaten dan Kota.

Reses Partisipatif adalah metode reses yang partisipatif dan berperspektif gender. Dalam Reses Partisipatif, penting untuk memastikan peserta mewakili sebanyak-banyaknya unsur dalam masyarakat, dilaksanakan di tempat yang nyaman dan suasana yang tidak formal

#### B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Sub kegiatan ini adalah kelompok masyarakat

#### C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan Kegiatan Rutin

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Reses dilaksanakan 3 x dalam setahun

#### D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember )

#### E. Biaya yang dikeluarkan

Anggaran untuk SUB kegiatan ini sebesar Rp 1.010.069.920,-

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN,



**INDRA SAKTI, SH, MM**  
NIP. 196601011989031017

### Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	<b>Identifikasi Isu/Masalah Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kekhawatiran bahwa pegawai jenis kelamin tertentu tidak mampu melaksanakan tugas Fasilitas Reses</li> </ul>
Langkah 2	<b>Identifikasi Faktor-faktor Penyebab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kekhawatiran bahwa pegawai jenis kelamin tertentu hanya bisa dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki</li> </ul>
Langkah 3	<b>Kerangka kerja logis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impact Meningkatnya persentase reses diantara gender</li> <li>- Outcome Terjadinya kesenjangan sosial</li> <li>- Output Terwujudnya jumlah laporan hasil reses</li> </ul> <b>Rencana Aksi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi kebutuhan data reses dari instansi eksternal</li> <li>2. Mengidentifikasi data yang memanfaatkan fasilitas umum</li> <li>3. Perlu koordinasi intensi dan berkala dengan perangkat daerah</li> <li>4. Perlu adanya monitoring dan evaluasi</li> </ol>
Langkah 4	<b>Identifikasi Unit Pelaksana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran</li> </ul>

No	Pertanyaan	Hasil Reviu
1.	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan	Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd Kegiatan : Pelaksanaan Reses Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses Kinerja Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman gender Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Reses Satuan : dokumen
2.	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	Berdasarkan gambaran Sub Kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1. Sub kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impact Meningkatnya persentase reses diantara gender</li> <li>- Outcome Terjadinya kesenjangan social</li> <li>- Output Terwujudnya jumlah laporan hasil reses</li> </ul>
3.	Bagaimana kondisi Sub kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarustamakan gender dari aspek <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses</li> <li>- Partipasi</li> <li>- Kontrol</li> <li>- Manfaat</li> </ul>	Saat ini sub kegiatan belum mengarustamakan gender, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses : -</li> <li>- Partipasi : -</li> <li>- Kontrol :</li> <li>- Manfaat :</li> </ul>
4.	Apa factor penyebab/kendala belum mengarustamakan	Penyebab Sub Kegiatan belum responsive gender : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor internal               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah SDM</li> </ul> </li> <li>b. Faktor Eksternal</li> </ol>

	gender? a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal	- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan reses
5.	Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub kegiatan menjadi responsive gender?	Rencana aksi agar sub kegiatan menjadi responsive gender : 1. Informasi resposif gender bagi pelaksana



INDRA SAKTI, SH, MM  
 NIP. 196601011989031017